

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
KODE PROGRAM	2.17.03		
KEGIATAN	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
SUB KEGIATAN	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Jumlah koperasi aktif = 145 unit - Jumlah Pengurus Koperasi laki-laki = 80% - Jumlah Pengurus Koperasi perempuan = 20% 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam manajemen koperasi. 2. Dominasi laki-laki dalam kepengurusan koperasi dibandingkan perempuan. Partisipasi : 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kontrol : Penilaian kinerja koperasi belum berbasis gender. Manfaat: Pengurus koperasi belum menyadari sepenuhnya manfaat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi yang sudah dilaksanakan. b. Penyebab Internal 1. Keterbatasan SDM tenaga teknis bidang koperasi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi. 2. Kurang sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi. 3. Kurangnya informasi dalam pengarusutamaan gender di lingkungan koperasi. c. Penyebab Eksternal 1. Masih rendahnya pemahaman Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian. 2. Masih kuatnya budaya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. 3. Kurangnya pemahaman terhadap konsep gender.		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur • Melakukan penilaian kinerja koperasi yang berbasis gender • Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang memperhatikan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di koperasi. • Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menjadi Pengurus Koperasi. 2. Indikator dan Target Kinerja 1. Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Pengurus Koperasi yang laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah kriteria penilaian kinerja koperasi yang melihat kepada aspek gender mulai dari keanggotaan koperasi, pengurus, manajer dan Pengawas.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Masukan	Rp.. 220.000.000,-	
	Keluaran	- Terlaksananya pengawasan terhadap 30 Koperasi	
	Hasil	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang responsive gender	

Painan, Maret 2021

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
TAHUN : 2022

PROGRAM	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
KODE PROGRAM	12.17.07
KEGIATAN	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
SUB KEGIATAN	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Data pada tahun 2020 Jumlah UMKM di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 8.661 UMKM yang terdiri dari IKM di sebanyak 2503 IKM yang dibagi menjadi 5 (lima) i industri: : Industri Sandang dan Kulit 280 IKM, Industri Pangan 1051, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 913 IKM, Industri Logam dan elektronika 103 IKM. - Pada saat ini masyarakat/ konsumen sudah mulai cerdas dalam menentukan produk yang digunakan atau dikonsumsi. Legalitas produk salah satu penentu mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ P-IRT), SNI untuk produk tertentu serta kandungan nilai gizi yang terdapat pada produk. - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga dituntut bagi IKM. Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin keberadaan IKM tersebut diterima baik secara lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.503 IKM tersebut yang memiliki sertifikat halal hanya 37 produk, legalitas merek (HKI) yang sudah terbit dan masih berlaku hanya 1 merek. Sedangkan untuk SNI belum ada produk SNI wajib serta 5 produk berinformasi nilai gizi. - Penerima manfaat produk IKM adalah masyarakat dari semua kalangan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, tua dan muda. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : - Kurangnya informasi tentang halal, Legalitas Merek Dagang (HKI) dan Izin edar bagi Pelaku IKM - Kurangnya pengetahuan pelaku IKM tentang diversifikasi produk potensi daerah Partisipasi : - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengurusan Sertifikat Halal, legalisasi merek dagang (HKI) dan Izin edar - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk Kontrol : - Perlunya pemahaman kepada pelaku IKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal, Legalisasi Merk Dagang (HKI) serta Izin Edar guna melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk itu sendiri. - Perlunya upgrade wawasan pelaku IKM mengenai pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk Manfaat: Dengan adanya legalitas produk : 1. Sertifikat Halal dan Izin Edar : - Kenyamanan dan keamanan konsumen akan meningkat. - Daya beli masyarakat meningkat. - Omset meningkat - Memperluas market share. 2. Legalitas merek Dagang (HKI) - Mempunyai brand sendiri dan tidak ada yang bisa menyamai dengan brand yang lain. - Merk dan produk bisa dikenal luas oleh masyarakat. - Omset meningkat Dengan adanya pelatihan diversifikasi produk pangan : - Meningkatnya jumlah varian produk yang beredar di pasaran - Omset IKM meningkat - Memperluas segmen pasar dan market share b. Penyebab Internal 1. Masih rendahnya alokasi anggaran khususnya untuk pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Halal dan HKI produk IKM. 2. Pelaku IKM yang dibina tersebar dan daerahnya luas. 3. Jumlah SDM bidang perindustrian kurang/sedikit untuk memberikan pembinaan dan pengawasan produk IKM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

	4. Untuk industri kimia dan bahan bangunan tertentu, masalah gender masih dipertimbangkan c. Penyebab Eksternal 1. Jarak tempuh dari lokasi IKM ke lokasi Dinas/Kantor Pengelola legalitas yang jauh. 2. Usaha yang dikelola IKM merupakan usaha sampingan sehingga mereka menganggap legalitas usaha tidak terlalu penting 3. Kurangnya informasi akan pentingnya legalitas usaha bagi IKM . 4. Pimpinan dari IKM lebih sering mengirim pegawainya dalam acara sosialisasi sehingga informasi yang diberikan tidak tepat sasaran. 5. Minimnya pelatihan untuk mengupgrade wawasan pelaku IKM dalam diversifikasi produk		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur • Meningkatnya kualitas produk IKM yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan		
	2. Indikator dan Target Kinerja - Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi Halal dan HKI		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah))		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	
		Masukan	Rp. 80.000.000,-
		Keluaran	- Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal dan HKI
		Hasil	Meningkatnya produk bersertifikat halal dan HKI (30 produk)

Painan, Maret 2021

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan


Drs. AZRAL
NIP. 196212311986021039